

**LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
( LKJ IP )**



**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
RUANG DAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2018**

# **PENETAPAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019**



**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN  
RUANG DAN PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DAFTAR ISI**

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
B. SISTEMATIKA LAPORAN	2
C. PERMASALAHAN UTAMA	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>8</b>
A. PERENCANAAN STRATEGIS	8
B. PERJANJIAN KINERJA	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015</b>	<b>17</b>
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
B. REALISASI ANGGARAN	28
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Mewujudkan good governance merupakan tujuan serta cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkannya diperlukan Rencana Strategis dan Visi dan Misi yang jelas dan kuat.

Dinas Bina Marga sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam mendukung pelaksanaan good governance, telah merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi serta rencana Strategis Dinas yang berpedoman pada Visi dan Misi serta RPJM Kabupaten Sidenreng Rappang.

Beberapa tujuan Dinas Bina Marga yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif sebagai berikut ; 1. Terpeliharanya jalan dan jembatan kabupaten serta fasilitas pendukungnya dalam kabupaten Sidenreng Rappang, 2. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan khususnya yang mendukung pusat-pusat kegiatan ekonomi dalam kabupaten Sidenreng Rappang, 3. Terkelolanya data base dan tersedianya sistem informasi manajemen jalan dan jembatan dalam kabupaten Sidenreng Rappang

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya tidaklah mudah, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain ; 1. Masih terbatasnya dana rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Ketidakseimbangan antara Beban kerja yang tinggi dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada, 3. Dana Operasional yang terbatas, 4. Belum optimalnya

pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan.

Adapun langkah – langkah yang ditempuh dalam mengatasi kendala yang ada yaitu ; 1. Meningkatkan dana untuk rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada dengan mengikut sertakan dalam kegiatan kursus dan pelatihan teknis kebinamargaan, 3. Melaksanakan program dan kegiatan dengan skala prioritas, 4. Mengintensifkan pelaksanaan monitoring melalui konsultan pengawas dan unsur teknis dinas

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dapat terselesaikan. Laporan Kinerja merupakan kewajiban yang harus dibuat sebagaimana amanah pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan wujud pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini telah berupaya mengungkapkan secara obyektif tentang keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai wujud komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dalam mengembangkan sistim akuntabilitas kinerja bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, hal ini tampak dari dukungan yang diberikan oleh seluruh bidang dan sekretariat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten sidenreng rappang.

Akhir kata, kepada seluruh bidang dan sekretariat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan kabupaten sidenreng rappang agar senantiasa meningkatkan kinerjanya yang berbasis pada prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel. Dengan demikian maka akan memberikan konstribusi tercapainya pemerintahan yang baik (good

governance) yang menjadi harapan masyarakat dan penyelenggara pemerintahan khususnya di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan.

.Pangkajene Sidenreng, Januari 2019

Kepala Pekerjaan Umum, Penataan  
Ruang dan Perhubungan  
Kabupaten Sidenreng Rappang

**Drs. ABDUL RASYID, M.Si**  
NIP 19661230 198611 1 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Gambaran Umum Organisasi**

Reformasi Pemerintahan Daerah yang ditandai dengan lahirnya 2 (dua) paket kebijakan Otonomi Daerah yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua regulasi diatas, selain memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan diri sesuai dengan prakarsa, potensi dan aspirasi masyarakatnya juga menuntut adanya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibutuhkan adanya penerapan prinsip-prinsip good governance melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas. Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan penjabaran dari Tap MPR RI Nomor IX/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Meningkatnya pengetahuan dan sikap kritis masyarakat dalam era reformasi dewasa ini, membuat masyarakat mulai mempertanyakan nilai dan tingkat kepuasan yang mereka peroleh atas pelayanan yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Dalam konteks inilah pengukuran kinerja instansi pemerintah sangat diperlukan. Selama ini pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Pengukuran kinerja suatu instansi

hanya ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tupoksinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh dari standar.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah sejauhmana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut terhadap kemajuan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan MEMPAN Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2018 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2019.

## **B. Sistematika Laporan**

### **1. Struktur Organisasi**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan berdasarkan Perda No. 52 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

#### **a. Kepala Dinas**

#### **b. Sekretariat, membawahi :**

- Kepala Sub Bagian Perencanaan

- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. **Kepala Bidang Tata Ruang dan Cipta Karya**, membawahi :
  - Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian
  - Kepala Seksi Tata Ruang
  - Kepala Seksi Cipta Karya
- d. **Kepala Bidang Jalan**, membawahi :
  - Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan Jalan dan Bina Konstruksi
  - Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan
  - Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan
- e. **Kepala Bidang Jembatan**, membawahi :
  - Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Jembatan
  - Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan
  - Kepala Seksi Pemeliharaan Jembatan
- f. **Kepala Bidang Kebersihan**, membawahi :
  - Kepala Seksi Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
  - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
  - Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
- g. **Kepala Bidang Perhubungan**, membawahi :
  - Kepala Seksi Angkutan Jalan
  - Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
  - Kepala Seksi Lalu Lintas dan Rekayasa Jalan

## 2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 52 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dijabarkan sebagai berikut : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu

Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pekerjaan umum, penataan ruang dan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

### **1. Kepegawaian**

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kabupaten Sidenreng Rappang nmharus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi,misi,tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian SKPD ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan pada Tahun 2016 berjumlah 94 orang PNS yang terdiri atas 71 Orang Laki-laki dan 23 orang perempuan.

#### ***Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Golongan :***

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	I	17	1	18
2.	II	14	3	17
3.	III	33	19	52
4.	IV	6	1	7
<b>Jumlah</b>		71	23	94

***Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Eselon :***

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	II	1	-	1
2.	III	5	1	6
3.	IV	15	3	18
4.	Staf	50	19	69
<b>Jumlah</b>				
		71	23	94

### **3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

#### ***a. Maksud***

Penyusunan LKJ IP dimaksudkan untuk mendorong setiap instansi pemerintah untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efektif dan efisien) dan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur. Dengan adanya LKJ IP ini kredibilitas SKPD ini diharapkan dapat lebih baik dimata pimpinan dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

#### ***b. Tujuan***

Tujuan dari disusunnya LKJ IP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun (2016).

Penyusunan LKJ IP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKJ IP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan

kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKJ IP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

## **B. Fungsi Strategis**

Berdasarkan pada Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu

**“Terwujudnya Infrastruktur Yang Mantap di Kabupaten Sidenreng Rappang”.**

Berdasarkan Visi tersebut di atas maka dirumuskan Misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan yang efektif, efisien dan berkesinambungan
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan untuk mendorong pengembangan wilayah
3. Membuka isolasi daerah terpencil, strategis guna meningkatkan pembangunan ekonomi
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan

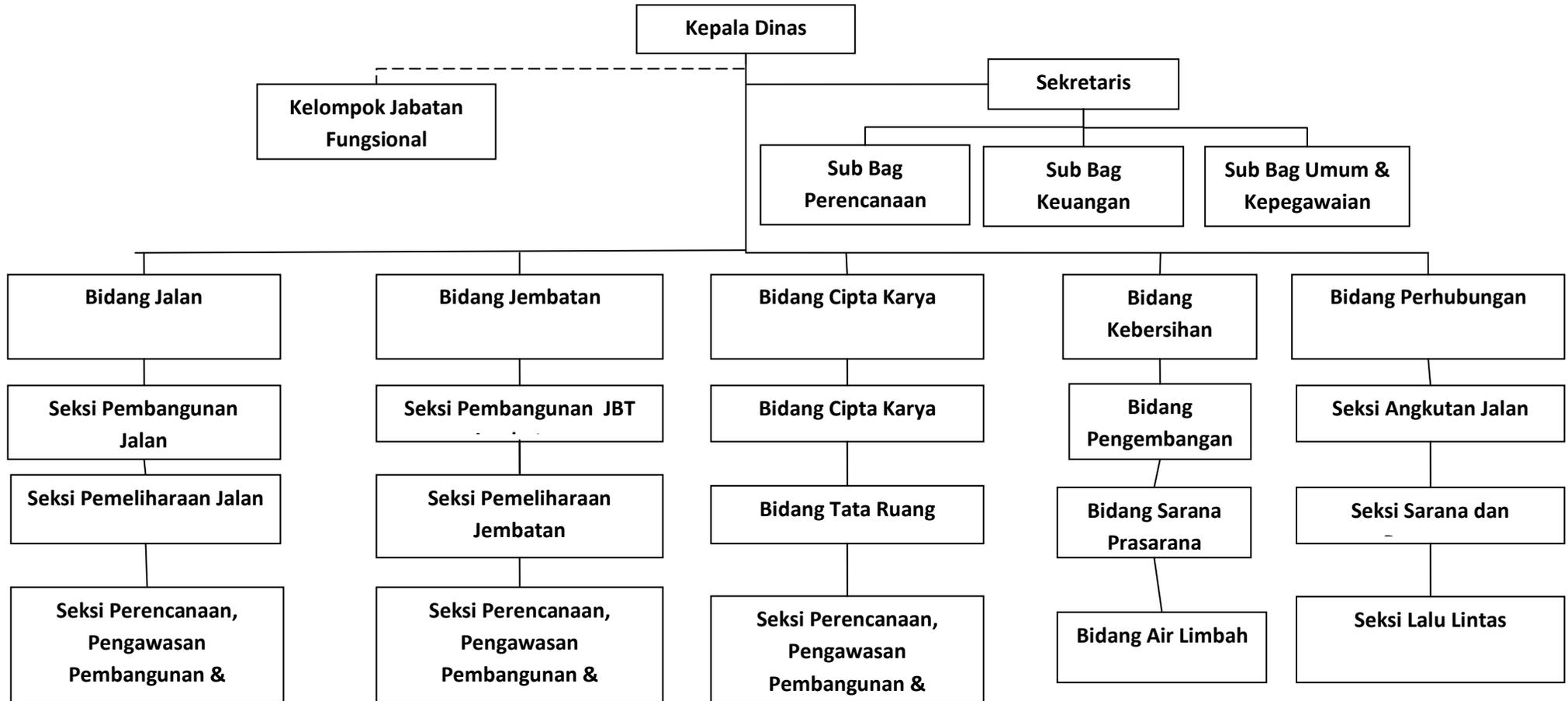
## **C. Permasalahan Utama**

Adapun permasalahan utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan Infrastruktur yang mantap adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kuantitas Sumber Daya Manusia pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

2. Masih tingginya dan meningkatnya pelanggaran muatan (lebih dari MST 8 Ton)
3. Semakin berkurangnya ketersediaan material alam (galian gol. C) sebagai bahan utama pendukung konstruksi jalan dan jembatan

## Struktur Organisasi Bina Marga



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Perencanaan Strategis**

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan ke arah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategis.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Inpres Nomor 7 tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

## 1. Visi dan Misi

### a. Visi

**Visi** adalah cara pandang ke depan yang berisi gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan serta ke mana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Oleh karena itu suatu **Visi** yang baik hendaknya mencakup; tujuan terluas dan terumum dan memiliki arah yang jelas, gambaran aspirasi masa depan, inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik, pencapaian pada hasil, komunikasi pernyataan misi dan persuasive pimpinan. Berdasarkan cakupan tersebut diatas, maka **Visi** Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Infrastruktur Yang Lebih Baik di Kabupaten Sidenreng Rappang”**.

### b. Misi

**Misi** merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan **Misi** membawa organisasi kepada suatu focus. **Misi** menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. **Misi** harus memperlihatkan secara jelas hal apa yang penting buat organisasi dan apa bidang usaha/kegiatan dari suatu organisasi disamping itu Misi juga harus menggambarkan sasaran public mana yang akan dilayani, serta aspirasi apa yang diinginkan dimasa mendatang utamanya yang berkaitan dengan manfaat yang didapatkan masyarakat dari pembangunan yang dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi maka **Misi** Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

1. Mewujudkan perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan yang efektif, efisien dan berkesinambungan
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan untuk mendorong pengembangan wilayah
3. Membuka isolasi daerah terpencil, strategis guna meningkatkan pembangunan ekonomi
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan jalan dan jembatan

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi seperti yang telah dikemukakan diatas, maka unit organisasi harus merumuskan Visi dan misi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

### **a. Tujuan**

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan pada masa datang, maka ditetapkanlah beberapa tujuan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten serta fasilitas pendukungnya
2. Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan khususnya yang mendukung pusat-pusat kegiatan ekonomi
3. Meningkatkan pengelolaan data base dan penyediaan system informasi manajemen jalan dan jembatan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendukung kebinamargaan

### **b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus

lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Terpeliharanya jalan dan jembatan kabupaten serta fasilitas pendukungnya
2. Meningkatnya kapasitas jalan dan jembatan khususnya yang mendukung pusat-pusat kegiatan ekonomi
3. Terkelolanya data base dan tersedianya system informasi manajemen jalan dan jembatan
4. Meningkatnya sarana prasarana pendukung kebinamargaan sesuai kebutuhan untuk peningkatan kinerja penanganan jalan.

### **3. Cara Mencapai Tujuan**

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

#### **a. Strategi.**

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan

ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi. Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan strategi yang dilaksanakan adalah mensinergikan dan meningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kabupaten dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan

**b. Kebijakan.**

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan adalah sebagai berikut;

1. Menetapkan dan menyusun program dan kegiatan prioritas secara proporsional sesuai dengan kebutuhan.
2. Mengoptimalkan perencanaan serta pengendalian teknis pembangunan jalan dan jembatan yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui program kerjasama dengan Badan Diklat dan Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan
4. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung aktivitas dalam rangka peningkatan produktivitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.
5. Memelihara dan mengoptimalkan fungsi dan peran peralatan dalam rangka mendukung peningkatan PAD
6. Mengoptimalkan penggunaan bahan dan material lokal dalam pembangunan jalan dan jembatan.

7. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja.
8. Mengoptimalkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam program dan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.

### **c. Program**

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Program Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6. Program pembangunan jalan dan jembatan
7. Program pembangunan saluran drainase / gorong - gorong
8. Program pembangunan turap / talud / bronjong
9. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan
10. Program pembangunan sistem informasi / data base jalan dan jembatan
11. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
12. Program penyediaan dan pengelolaan air baku

13. Program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
14. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
15. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
16. Program pembangunan infrastruktur perdesaan
17. Program perencanaan tata ruang
18. Program pemanfaatan ruang
19. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
20. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
21. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
22. Program peningkatan pelayanan angkutan
23. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
24. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
25. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
26. Program pengembangan data / informasi

## **B. Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan) dan pemberi amanah (Bupati Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan pada Tahun 2018 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan telah melaksanakan 26 program 61 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp 373.482.885.000,- ( tiga ratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah ) dan diperubahan menjadi Rp 378.722.375.000,-( tiga ratus tujuh

puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ). Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dengan Bupati Sidenreng Rappang tahun 2018.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Di tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

### A.1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
Terciptanya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase capaian kinerja keuangan	100 %	100 %
	Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100 %	100 %
	Terselesainya jasa administrasi keuangan	100 %	100 %
Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	90.93 %	90.93 %
	Proporsi panjang jaringan jembatan dalam kondisi baik	98.19 %	98.19 %
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Peningkatan pelayanan angkutan	100 %	100 %
Terbangunnya talud untuk memperkuat infrastruktur jalan	Terbangunnya talud untuk memperkuat infrastruktur jalan	32.18 %	32.18 %
Terpeliharanya jalan dan jembatan	Terpeliharanya jalan	16.50 %	16.50 %
Tersedianya sarana kebinamargaan	Tersedia alat berat	100 %	100 %
Terbangunnya infrastruktur jalan di kawasan strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya infrastruktur jalan	35.00 %	35.00 %
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB	Pemanfaatan ruang	11 Kec	11 Kec

### A.2. Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun terakhir

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2017		2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Terciptanya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Persentase capaian kinerja keuangan	100	100	100	100

	Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100	100	100	100
	Terselesaikannya jasa administrasi keuangan	100	100	100	100
Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	86.91	86.91	90.93	90.93
	Proporsi panjang jaringan jembatan dalam kondisi baik	95.10	95.10	98.19	98.19
Terbangunnya talud untuk memperkuat infrastruktur jalan	Terbangunnya talud untuk memperkuat infrastruktur jalan	31.84	31.84	32.18	32.18
Terpeliharanya jalan dan jembatan	Terpeliharanya jalan	13.70	13.70	16.50	16.50
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedia alat berat	96.77	96.77	100	100
Terbangunnya infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya infrastruktur jalan	33.96	33.96	35.00	35.00

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2018 dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 terutama untuk penyerapan anggaran terjadi kenaikan.

### **A.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .**

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 dan Rencana Strategis Tahun 2014 - 2018 maka sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini yaitu :

1. Sasaran 1 : Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas,efektif,efisien,transparan dan akuntabel.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2017	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
1	2	3	4	5	6	7
Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas,efektif,efisien,transparan dan akuntabel	Persentase capaian kinerja keuangan	100	100	100	100	100
	Terlaksananya penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	100	100	100	100	100
	Terselesaikannya jasa administrasi keuangan	100	100	100	100	100

Secara umum capaian indikator pada sasaran 1 Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas,efektif,efisien,transparan dan akuntabel.

Capaian kinerja pada sasaran 1 rata rata capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100 %, Untuk realisasi kinerja sampai dengan 2018 jika dibandingkan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan telah mencapai 100 %.

Penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran I adalah Rp. 34.673.000,- atau dari total pagu Rp. 45.543.000, keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program pengembangan data dan informasi dengan beberapa kegiatan :

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

## 2. Sasaran 2 : Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2017	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
1	2	3	4	5	6	7
Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	90,93	90,93	100	90,93	90,93
	Proporsi panjang jaringan jembatan dalam kondisi baik	98.19	98.19	100	98.19	98.19

Secara umum capaian indikator pada sasaran 2 Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dapat tercapai sesuai dengan target.

Capaian kinerja pada sasaran 2 rata rata capaian kinerja tahun 2018 sebesar 90.93 %, jika dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat yaitu 86.91 %, Untuk realisasi kinerja sampai dengan 2018 jika dibandingkan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan telah mencapai 90.93 %, dengan perhitungan berdasarkan pencapaian prosentase.

Penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran 2 adalah Rp. 121.825.732.818,- atau 86.90 % dari total pagu Rp. 140.194.413.000,- keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan dengan beberapa kegiatan :

- Pembangunan jalan
- Pembangunan jembatan

### 3. Sasaran 3 : Terbangunnya Talud untuk Memperkuat Infrastruktur Jalan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2018	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
1	2	3	4	5	6	7
Terbangunnya talud untuk memperkuat infrastruktur jalan	Terbangunnya talud untuk memperkuat infrastruktur jalan	32.18	32.18	100	32.18	32.18

Secara umum capaian indikator pada sasaran 3 Terbangunnya Talud untuk Memperkuat Infrastruktur Jalan.

Capaian kinerja pada sasaran 3 rata rata capaian kinerja tahun 2018 sebesar 32.18 %, jika dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat yaitu 31.84 %, Untuk realisasi kinerja sampai dengan 2018 jika dibandingkan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan telah mencapai 32.18 %, dengan perhitungan berdasarkan pencapaian prosentase.

Penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran 3 adalah Rp. 3.259.092.800,- atau 55,88 % dari total pagu Rp. 5.832.274.000,- keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program Pembangunan turap / talud / bronjong.

### 4. Sasaran 4 : Terpeliharanya Jalan dan Jembatan

Untuk mencapai hal tersebut pada sasaran 4 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2018	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
1	2	3	4	5	6	7
Terpeliharanya jalan dan jembatan	Terpeliharanya jalan	16,50	16,50	100	16,50	16.50

	Terpeliharanya infrastruktur jalan	16,50	16,50	100	16,50	16.50
--	------------------------------------	-------	-------	-----	-------	-------

Secara umum capaian indikator pada sasaran 4 Terpeliharanya Jalan dan Jembatan.

Capaian kinerja pada sasaran 4 rata rata capaian kinerja tahun 2018 sebesar 16.50 %, jika dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat yaitu 13.70 %. Untuk realisasi kinerja sampai dengan 2018 jika dibandingkan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan telah mencapai 16.50 %, dengan perhitungan berdasarkan pencapaian prosentase.

Penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran 4 adalah Rp. 48.984.484.890,- atau 39,33 % dari total pagu Rp. 124.532.763.000,- keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan dengan beberapa kegiatan :

- Rehabilitasi / pemeliharaan jalan
- Rehabilitasi / pemeliharaan infrastruktur jalan

5. Sasaran 5 : Tersedianya dan Tepeliharanya Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Untuk mencapai hal tersebut pada sasaran 5 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2017	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
1	2	3	4	5	6	7
Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan	Tersedianya alat berat	100	100	100	100	100
	Tersedianya alat laboratorium	100	100	100	100	100
	Terpeliharanya sarana dan	100	100	100	100	100

	prasarana kebinamargaan					
--	-------------------------	--	--	--	--	--

Secara umum capaian indikator pada sasaran 5 Tersedianya dan Terpeliharanya sarana dan prasarana kebinamargaan.

Capaian kinerja pada sasaran 5 rarta rata capaian kinerja tahun 2018 sebesar 100 %, jika dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat yaitu 96.77 %. Untuk realisasi kinerja sampai dengan 2018 jika dibandingkan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan telah mencapai 100 %, dengan perhitungan berdasarkan pencapaian prosentase.

Penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran 5 adalah Rp. 340.373.500,- atau 52,14 % dari total pagu Rp. 652.753.000,- keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan dengan beberapa kegiatan:

- Rehabilitasi / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat – alat berat.

6. Sasaran 6 : Terbangunnya Infrastruktur Jalan di Wilayah Startegis Khususnya di Perdesaan.

Untuk mencapai hal tersebut pada sasaran 6 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2017	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
1	2	3	4	5	6	7
Terbangunnya infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh	Terbangunnya infrastruktur jalan	35	35	100	35	35
	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	35	35	100	35	35

Secara umum capaian indikator pada sasaran 6 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan.

Capaian kinerja pada sasaran 6 rarta rata capaian kinerja tahun 2018 sebesar 35 %, jika dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat yaitu 33,96 %. Untuk realisasi kinerja sampai dengan 2018 jika dibandingkan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan telah mencapai 35 %, dengan perhitungan berdasarkan pencapaian prosentase

Penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran 6 adalah Rp. 10.815.963.000,- atau 18,87 % dari total pagu Rp. 57.303.844.000,- , keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan beberapa kegiatan :

- Pembangunan / peningkatan infrastruktur
- Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

7. Sasaran 7 : Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB

Untuk mencapai hal tersebut pada sasaran 7 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2017	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
1	2	3	4	5	6	7
Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB	Pemanfaatan ruang	1	1	100	1	8

Secara umum capaian indikator pada sasaran 7 Meningkatnya kualitas pemanfaatan ruang.

Capaian kinerja pada sasaran 7 rarta rata capaian kinerja tahun 2018 adalah 100 %, jika dibandingkan dengan tahun 2017 sama yaitu 100 %. Untuk realisasi kinerja

sampai dengan 2018 jika dibandingkan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan telah mencapai 100 %, dengan perhitungan berdasarkan pencapaian prosentase

Penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran 7 adalah Rp. 270.908.200,- atau 20,87 % dari total pagu Rp. 1.297.860.000,- , keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program pemanfaatan ruang dengan beberapa kegiatan :

- Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Pemanfaatan ruang

#### 8. Sasaran 8 : Jumlah arus penumpang angkutan umum

Untuk mencapai hal tersebut pada sasaran 8 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2017	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Peningkatan pelayanan angkutan	100 %	100 %	100	100 %	100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran 8 Meningkatnya pelayanan angkutan

Capaian kinerja pada sasaran 8 rarta rata capaian kinerja tahun 2018 adalah 100 %, jika dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat yaitu 95 %. Untuk realisasi kinerja sampai dengan 2018 jika dibandingkan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan telah mencapai 100 %, dengan perhitungan berdasarkan pencapaian prosentase

Penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran 7 adalah Rp. 62.640.000,- atau 31,69 % dari total pagu Rp. 197.642.000,- , keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program pelayanan angkutan dengan beberapa kegiatan :

- Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan
- Kegiatan penataan tempat – tempat pemberhentian angkutan umum
- Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah
- Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

9. Sasaran 9 : Data KIR kendaraan di Kabupaten Sidenreng Rappang

Untuk mencapai hal tersebut pada sasaran 9 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian Tahun 2017	% capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
1	2	3	4	5	6	7
Data KIR di Kabupaten Sidenreng Rappang	Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	100 %	100 %	100	100 %	100%

Secara umum capaian indikator pada sasaran 9 Meningkatnya Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Capaian kinerja pada sasaran 9 rarta rata capaian kinerja tahun 2018 adalah 100 %, jika dibandingkan dengan tahun 2017 meningkat yaitu 95 %. Untuk realisasi kinerja sampai dengan 2018 jika dibandingkan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan telah mencapai 100 %, dengan perhitungan berdasarkan pencapaian prosentase

Penyerapan anggaran untuk pencapaian sasaran 7 adalah Rp. 34.889.000,- atau 44,09 % dari total pagu Rp. 79.128.000,- , keberhasilan pencapaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan program pemanfaatan ruang dengan beberapa kegiatan :

- Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

## B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2018, didukung dengan anggaran sebesar Rp. 378.722.375.000,- anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Realisasi anggaran belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp. 220.158.779.439,- atau 58,13 % dari total pagu anggaran. Dengan demikian terdapat anggaran sebesar Rp. 158.563.595.561,- belum terserap pada tahun 2018. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan yang diukur melalui program dan kegiatan secara umum memenuhi target.

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.731.055.000,-
2. Belanja Langsung Rp. 372.991.320.000,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian sasaran sebagai berikut :

### ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2017

No	Jenis Belanja	Program	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%	
							F	K
1	Belanja Langsung	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.272.577.00	2.252.250.977	1.020.326.023	68,82	68,82
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,500,000	2.436,000	8.064.000	100	21,20

			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183,000,000	138.394.515	44.605.485	100	75,63
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	29,438,000	27.763.400	1.674.600	<b>100</b>	94,31
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Jaminan kendaraan dinas / operasional	179.370.000	41.579.610	137.790.390	<b>100</b>	23,18
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	452.022,000	258.311.200	193.710.800	100	57,15
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44.810.000	26.000.000	18.810.000	100	58,02
			Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	6.995,000	188.000	6.807.000	2,69	2,69
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	10.000.000	350.000	9.650.000	3,50	3,50
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	400.100.000	379.124.730	20.975.270	100	94,76
			Rapat-rapat					

			Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	54.800.000	5.548.790	49.251.250	100	10,13
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.901.542.000	1.372.554.772	528.987.228	100	72,18
2		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>19.585.923.000</b>	<b>11.821.893.735</b>	<b>7.764.029.265</b>	<b>60,36</b>	<b>60,36</b>
			Pengadaan kendaraan dinas / operasional	463.406.000	461.800.000	1.606.000	100	99,65
			Pengadaan peralatan gedung kantor	13,000,000	-	13,000,000	0,00	0,00
			Pembangunan gedung kantor ( Bidang Permukiman )	18.368.412.000	11.237.365.575	7.131.046.425	100	61,18
			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	93.300.000	12.743.500	80.556.500	100	13,66
			Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	28,375,000	6.375.000	22.000.000	100	22,47
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	568.070.000	100.864.660	467.205.340	100	17,76

			Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor	12.750.000	470.000	12.280.000	100	3,69
			Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	27.860.000	2.275.000	25.585.000	100	8,17
			Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur	10.750.000	0	10.750.000	0	0
3		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		<b>45.543,000</b>	<b>34.673,000</b>	<b>10.870,000</b>	<b>100</b>	<b>76,13</b>
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>45.543,000</b>	<b>34.673,000</b>	<b>10.870,000</b>	<b>100</b>	<b>76,13</b>
4		<b>Program Pembangunan Jalan dan Jembatan</b>		<b>140.194.413.000</b>	<b>121.825.732.818</b>	<b>18.368.680.182</b>	<b>100</b>	<b>86,90</b>
			Pembangunan jalan	136.400.995.000	118.962.214.868	17.438.780.132	100	87,22
			Pembangunan jembatan	3.793.418.000	2.863.517.950	929.900.050	100	75,49
5		<b>Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong</b>		<b>1.005.346.000</b>	<b>326.158.000</b>	<b>679.188.000</b>	<b>100</b>	<b>32,44</b>

			Pembangunan saluran drainase gorong – gorong	1.005.346.000	326.158.000	679.188.000	100	32,44
6		<b>Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong</b>		<b>5.832.274.000</b>	<b>3.259.092.800</b>	<b>2.573.181.200</b>	<b>95</b>	<b>55,88</b>
			Pembangunan turap / talud / bronjong	5.832.274.000	3.259.092.800	2.573.181.200	95	55,88
7		<b>Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>		<b>124.532.763,000</b>	<b>48.984.484.890</b>	<b>75.548.278.110</b>	<b>100</b>	<b>39,33</b>
			Rehabilitasi / pemeliharaan jalan	89.014.710.000	44.935.785.390	44.078.924.610	100	50,48
			Rehabilitasi / pemeliharaan infrastruktur jalan	35.518.053.000	4.048.699.500	31.469.353.500	100	11,40
8		<b>Program Pembangunan Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan</b>		<b>285.700.000</b>	<b>285.700.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
			Penyusunan Sistem Informasi / Data base Jalan	285.700.000	285.700.000	0	100	100

9		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan</b>		<b>652.753.000</b>	<b>340.373.500</b>	<b>312..379.500</b>	<b>52,14</b>	<b>52,14</b>
			Rehabilitasi / pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat – alat berat	<b>652.753.000</b>	<b>340.373.500</b>	<b>312..379.500</b>	<b>52,14</b>	<b>52,14</b>
10		<b>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</b>		<b>7.006.825.000</b>	<b>5.813.365.139</b>	<b>1.193.459.861</b>	<b>100</b>	<b>82,97</b>
			Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa	7.006.825.000	5.813.365.139	1.193.459.861	100	82,97
		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah</b>		<b>595.915.000</b>	<b>523.596.125</b>	<b>72.318.875</b>	<b>87,86</b>	<b>87,86</b>
			Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	595.915.000	523.596.125	72.318.875	87,86	87,86
11		<b>Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh</b>		<b>57.303.844,000</b>	<b>10.815.963.000</b>	<b>46.487.881.000</b>	<b>85,00</b>	<b>18,87</b>
			Pembangunan / peningkatan infrastruktur	51.012.795.000	5.530.702.000	45.482.093.000	80	10,84

			Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	6.291.049.000	5.285.261.000	1.005.788.000	95,00	84,01
12		<b>Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan</b>		<b>6.150.978,000</b>	<b>4.174.614.450</b>	<b>1.976.363.550</b>	<b>100</b>	<b>57,87</b>
			Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan	6.150.978,000	4.174.614.450	1.976.363.550	100	57,87
13		<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>		<b>106.225.000</b>	<b>39.655.000</b>	<b>66.570.000</b>	<b>85,00</b>	<b>37,33</b>
			Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	106.225.000	39.655.000	66.570.000	85,00	37,33
14		<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>		<b>1.297.860.000</b>	<b>270.908.200</b>	<b>1.026.951.800</b>	<b>85</b>	<b>20,87</b>
			Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	99.000.000	99.000.000	0	100	100
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	338.015.000	62.873.200	275.141.800	18,60	18,60
			Survey dan pemetaan	860.845.000	109.035.000	751.810.000	12,67	12,67

15		<b>Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan</b>		<b>4.367.917.000</b>	<b>3.564.322.600</b>	<b>803.594.400</b>	<b>100</b>	<b>81.60</b>
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	963.264.000	626.173.750	337.090.350	100	65,01
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	3.404.653.000	2.938.148.850	466.504.150	100	86,30
16		<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Penyusunan program pengembangan RTH	0	0	0	0	0
17		<b>Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Fasilitas Perhubungan</b>		<b>139.564.000</b>	<b>110.399.000</b>	<b>29.165.000</b>	<b>79,10</b>	<b>79,10</b>
			<b>Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat</b>	139.564.000	110.399.000	29.165.000	79,10	79,10
18		<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>		<b>117.710.000</b>	<b>36.424.000</b>	<b>81.286.000</b>	<b>30,94</b>	<b>30,94</b>
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana alat	12.202.000	3.097.000	9.105.000	25,38	25,38

			pengujian kendaraan bermotor					
			Rehabilitasi / Pemeliharaan rambu – rambu lalu lintas	24.429.000	998.000	23.431.000	4,09	4,09
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Warning Light	81.079.000	32.329.000	48.750.000	39,87	39,87
19		<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>		<b>197.642.000</b>	<b>62.640.000</b>	<b>135.002.000</b>	<b>31,69</b>	<b>31,69</b>
			Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	60.774.000	21.600.000	39.174.000	35,54	35,54
			Kegiatan penataan tempat – tempat pem berhentian angkutan umum	61.330.000	25.200.000	36.130.000	41,09	41,09
			Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah	49.974.000	15.840.000	34.134.000	31,70	31,70
			Fasilitas perijinan di bidang perhubungan	25.564.000	0	25.564.000	-	0,00

20		<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>		<b>142.320.000</b>	<b>0</b>	<b>142.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Pengadaan rambu – rambu lalu lintas	138.180.000	0	138.180.000	0	0
			Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	4.140.000	0	4.140.000	0	0
21		<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>		<b>79.128.000</b>	<b>34.889.000</b>	<b>44.239.000</b>	<b>44,09</b>	<b>44,09</b>
			Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	79.128.000	34.889.000	44.239.000	44,09	44,09
22		<b>Program Pengembangan Data / Informasi</b>		<b>78.100.000</b>	<b>41.200.000</b>	<b>36.900.000</b>	<b>52,75</b>	<b>52,75</b>
			Pengembangan Data / Informasi	78.100.000	41.200.000	36.900.000	52,75	52,75
<b>TOTAL</b>				<b>372.991.320.000</b>	<b>214.618.336.234</b>	<b>158.372.983.766</b>		<b>57,54</b>



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan berbagai kewajiban penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Laporan ini dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018. Kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan kebijakan guna meningkatkan kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang.

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,  
PENATAAN RUANG DAN PERHUBUNGAN  
Kabupaten Sidenreng Rappang**

**Drs. ABDUL RASYID, M.Si**  
NIP. 19661230 198611 1 001